

IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA (Studi pada SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)

NASHARI

(Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis)

Abstract

Implementation of Adiwiyata School Program (Study at SMP Negeri 6 Bantan District Bantan Bengkalis Regency) This research was conducted on the basis of SMP Negeri 6 Bantan Bantan District Bengkalis become Adiwiyata school. Researcher use qualitative method with descriptive approach. This study shows that the school passed the selection at the district level and succeeded in becoming the Adiwiyata School at Riau Province Level. Result of research indicate that there are four program that is applied that is komposter; garden development; breeding and waste management programs. The program is implemented based on components such as environmentally sound policies; implementation of an environment-based curriculum; participatory environmental activities and management of environmentally friendly means of support. Implementation of the program there are internal support factors that are qualified human resources and the vision, mission, functions and management of a good budget. The external supporting factors of the guardian side and the provision and cost of school operations sourced from the local government of Bengkalis Regency and the cooperation between the principal, teachers, administrative staff and learners are so compact.

Keywords: *implementation, junior high school, Adiwiyata*

Abstrak: Implementasi Program Sekolah Adiwiyata (Studi Pada SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis) Penelitian ini dilakukan atas dasar SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis menjadi sekolah Adiwiyata. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah tersebut lolos dalam seleksi di tingkat kabupaten dan berhasil pula menjadi Sekolah Adiwiyata di Tingkat Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat program yang diterapkan yaitu komposter; pengembangan taman; pembibitan dan program pengelolaan sampah. Program tersebut diterapkan berdasarkan komponen antara lain kebijakan berwawasan lingkungan; pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Penerapan program tersebut terdapat faktor pendukung internal yakni sumber daya manusia yang mumpuni dan adanya visi, misi, fungsi serta pengelolaan anggaran yang baik. Faktor pendukung eksternal adanya pihak wali murid dan pemberian dan biaya operasional sekolah yang bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis serta kerjasama antara kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha dan peserta didik yang begitu kompak.

Kata Kunci: *implementasi, sekolah menengah pertama, Adiwiyata*

Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab untuk menjadikan negara yang maju yang dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengedepankan sistem pendidikannya. Pendidikan memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah mendukung kegiatan penyelamatan bumi dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan yang diterapkan dalam dunia pendidikan yang tertera dalam pasal 65 poin keempat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “setiap orang berhak dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”. Dari pernyataan tersebut pemerintah dalam hal ini adalah institusi pendidikan dimaksudkan ikut serta dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan melalui pencanangan program sekolah Adiwiyata. Adiwiyata diterapkan dalam dunia pendidikan disebabkan dalam dunia pendidikan lebih mudah mempelajari dan menerapkan segala ilmu pengetahuan dan

berbagai norma serta etika untuk mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 6 Bantan berawal pada tahun 2014. Bermula dari ditunjuknya SMP Negeri 6 Bantan untuk menjadi peserta sekolah Adiwiyata oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bantan di tingkat kabupaten. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bengkalis mengenai program Adiwiyata baik sekolah negeri maupun swasta. SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan mengikuti program sekolah Adiwiyata sejak tahun 2014. Selama mengikuti seleksi program sekolah Adiwiyata, SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis bersaing secara ketat dengan sekolah-sekolah lain di Kabupaten Bengkalis. Baru pada tahun 2016 terpilih menjadi Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bengkalis dan melalui penilaian yang ketat berhasil pula menjadi Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Riau pada tahun 2017. Dalam penerapan program sekolah Adiwiyata, SMP Negeri 6 Bantan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata tingkat nasional maupun tingkat mandiri. Dari kondisi inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Implementasi Program Sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pendidikan

Ilmu Administrasi¹ sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang usaha atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi pendidikan ialah pengembangan dari disiplin ilmu administrasi khususnya administrasi publik. Administrasi pendidikan berada pada satu ruang lingkup administrasi publik. Hal ini diperjelas oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 2 tentang Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.

Keterkaitan administrasi publik dan administrasi publik bahwa bidang pendidikan merupakan usaha yang berada di bawah pengendalian dan pengawasan pemerintah, maka secara umum dapat dikatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan bagian dari administrasi negara (public administration)². Secara umum tujuan administrasi pendidikan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 2 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pada dasarnya tujuan administrasi pendidikan bermaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada dalam pendidikan baik kegiatan administrasi pendidikan maupun kegiatan operasional pendidikan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Tidak hanya tujuan, tetapi administrasi pendidikan memiliki dua ruang lingkup yaitu manajemen operatif dan manajemen administratif.³

2. Kebijakan Publik

Administrasi publik tidak terlepas dari sebuah kebijakan. Beberapa tokoh menyumbangkan pemikirannya tentang definisi kebijakan tersebut. Kebijakan memiliki makna dalam Bahasa Inggris yakni ‘policy’ is that of a course of action or plan, a set of political purposes – as opposed to ‘administration’ atau kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik⁴.

3. Implementasi Kebijakan

Definisi dari kebijakan publik adalah sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang berkaitan satu sama lain yang mampu mempengaruhi sebegini besar warga. Untuk menyederhanakan dalam implementasi kebijakan, maka dibentuk model-model implementasi kebijakan⁵. Model-model implementasi kebijakan tersebut akan memudahkan dalam pelaksanaan proses kebijakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi yang di dalamnya terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Empat faktor atau variabel tersebut adalah faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi⁶.

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi digunakan sebagai upaya penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan dapat

¹ Nawawi, Administrasi Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung. 1984, hal. 12.

² Ibid. hal 14

³ Ibid. hal 14

⁴ Person, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 1997, hal. 14

⁵ Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal. 5

⁶ Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia Publishing, 2010 hal. 96

mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Faktor komunikasi memiliki mempunyai beberapa dimensi, antara lain transformasi, kejelasan, dan konsistensi.

b. Faktor Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan secara efektif dan efisien, maka memperhatikan ketentuan atau aturan yang ada. Jika pelaku kebijakan tidak memperhatikan sumber daya, yang didapat implementasi kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif dan efisien. Faktor sumber daya dibagi menjadi tiga. Yang pertama sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Sumber daya dalam model ini harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staff (sumber daya manusia) yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya. Yang kedua adalah sumber daya keuangan atau anggaran, yang mana berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan⁷.

Apabila terjadi keterbatasan dana dan peralatan, yang terjadi adalah kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Banyak permasalahan baik dalam tubuh organisasi maupun program yang akan dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan sistem akuntabilitas dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Yang ketiga, sumber daya peralatan yang mana sebagai sarana untuk operasional dalam pelaksanaan kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan saat memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Dengan terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan. Yang keempat ialah sumber daya informasi dan kewenangan. Kewenangan merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakansanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.

c. Faktor Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi juga berpengaruh dengan bagaimana sikap implementator dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementator bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya.

d. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

4. Program Sekolah Adiwiyata

Program menurut berbagai tokoh yang dijelaskan oleh Midia Juniar dalam jurnal Studi tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Perspektif Deliberatif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang volume 1 nomor 1 tahun 2013, antara lain⁸:

Program adalah suatu lingkup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan jelas batas-batasnya, mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legitimasi, pengorganisasian dan pengarahan atau penyediaan sumber -sumber yang diperlukan⁹.

Program menurut adalah aktivitas sosial yang terorganisasi dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas.

Pada dasarnya, kebijakan dan program sulit dibedakan. Perbedaan antara kebijakan dan program dinyatakan secara tidak langsung bahwa implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program dan tergantung pada hasilnya. Selain itu program didesain sedemikian rupa sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan kebijakan lebih luas. Dapat dikatakan bahwa program merupakan pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pendidikan lingkungan hidup merupakan upaya pemerintah Indonesia demi menghindari kerusakan lingkungan yang lebih parah di kemudian hari. Tidak hanya pemerintah Indonesia yang bergerak untuk peduli akan pendidikan lingkungan hidup tetapi berbagai pihak di dunia juga berupaya melakukan program peduli

⁷ ibid

⁸ Studi tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Perspektif Deliberatif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang volume 1 nomor 1.

⁹ Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal.17

terhadap kelestarian lingkungan. Maka dari itu Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2006 mencanangkan program Adiwiyata. Dalam hal ini, penjelasan mengenai Adiwiyata mengacu atau yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2013 serta buku panduan Adiwiyata.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan laporan yang mempunyai isi berupa kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan¹⁰. Fokus penelitian ini adalah (1) implementasi program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan (2) faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program sekolah Adiwiyata.

Lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Data diperoleh berdasarkan sumber pengambilannya yang berasal dari dua sumber, yakni primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan model interaktif, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan¹¹.

PEMBAHASAN

Implementasi program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 6 Bantan Kabupaten Bengkalis

Program sekolah Adiwiyata merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan melalui pendidikan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2013 diterjemahkan menjadi program sekolah Adiwiyata. Implementasi program tersebut terdapat alur, alur yang dilakukan oleh SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis juga memperhatikan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang memberikan alokasi anggaran untuk melaksanakan program sekolah Adiwiyata. Alur tersebut terdiri dari sosialisasi oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, pembentukan tim Adiwiyata di sekolah, menyusun kajian lingkungan dan rencana aksi, penilaian oleh tim BLH dan penghargaan sekolah Adiwiyata.

Penerapan program sekolah Adiwiyata memiliki kriteria yang dilihat dari komponen dan standarnya. Komponennya antara lain: (1) Kebijakan berwawasan lingkungan serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang mana diaplikasikan di dalam ruang lingkup sekolah berupa adanya visi, misi dan tujuan sekolah yang memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan dimana guru atau pendidik berkompentensi sehingga dalam penyampaian pembelajaran lingkungan hidup dapat dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik, (3) Kegiatan lingkungan perlindungan berbasis partisipatif dimana SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan menerapkan melalui kegiatan komposter, pengelolaan taman, pembibitan dan program pengelolaan daur ulang sampah yang mana seluruh kegiatan tersebut melibatkan seluruh warga sekolah, (4) Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan yang mana SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan dalam penyediaan sarana prasarana berupa tong sampah, ruang terbuka hijau atau green house, dan tempat daur ulang. Namun terdapat kendala dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan perlindungan hidup yaitu adanya tahap pembangunan gedung yang sedang berlangsung membuat sarana prasarana rusak dan masih ada penggunaan plastik dalam pengemasan makanan di kantin sekolah. Selain itu, kantin sekolah masih menjual mie instan yang merupakan makanan cepat saji dan menggunakan plastik dalam pengemasannya. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan komponen yang ada dalam program sekolah Adiwiyata. Namun sekolah berusaha untuk melakukan program kantin sehat yang bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Bantan dan Nusantara sehat, sehingga kondisi peningkatan koalitas dan perlindungan hidup semakin baik.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 6 Bantan

Faktor pendukung dalam implementasi program sekolah Adiwiyata di SMP Negeri 6 Bantan adalah, adanya tenaga pendidik yang memiliki jenjang pendidikan tinggi jiwa sosial dan bekerja tanpa pamrih. Hal ini mendorong akan keberhasilan dalam penerapan program sekolah Adiwiyata. Ada pula berbagai metode dalam pembelajaran yang berbasis lingkungan hidup dan memanfaatkan berbagai fasilitas pengembangan program Adiwiyata sekolah. Adanya keterlibatan pihak wali murid dan pemerintah membuat penerapan program sekolah Adiwiyata berjalan dengan lancar. Hal ini didukung pula oleh kekompak warga SMP Negeri 6 Bantan dalam pengembangan program Adiwiyata di sekolah. Namun ada sedikit hambatan dalam pelaksanaan program Adiwiyata, yaitu mengenai anggaran yang belum maksimal dialokasikan untuk berbagai program pengembangan sekolah terhadap kepedulian lingkungan baik UKS maupun program Adiwiyata, penggunaan kemasan plastik yang belum maksimal dihapuskan pemakaiannya di kantin sekolah dan

¹⁰ Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2007 hal..324

¹¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012 hal.246.

pembangunan fisik yang merusak berbagai tanaman yang ditanam di sekolah.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat pemerintah melalui pendidikan akan terlaksana dengan baik dan mencapai penghargaan Adiwiyata. Namun, SMP Negeri 6 Bantan Kecamatan Bantan dalam penerapan program sekolah Adiwiyata mengalami sedikit hambatan terutama permasalahan kurang maksimalnya anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Wahab, Solichin. (2005) Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi kedua, cetakan kelima. Jakarta, Bumi Aksara.
- Buku Panduan Adiwiyata. (2011) Panduan Adiwiyata. [internet] available from <<http://panduan.adiwiyata.com>> (accessed: 20 September 2013).
- Juniar, Midia. (2013) Studi tentang Implementasi Program Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (StoPs) dalam Perspektif Deliberatif di Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang volume 1 nomor 1.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. (1984) Administrasi Pendidikan. Jakarta, Gunung Agung.
- Parsons, Wayne. (1997) Public policy: pengantar teori dan praktek analisis kebijakan. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata. Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sugiyono. (2012) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 2 tentang Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Widodo, Joko. (2010) Analisis Kebijakan Publik. Malang, Bayumedia Publishing.